

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Besarnya jumlah penduduk dapat mendorong pembangunan ekonomi kearah yang lebih baik jika kemampuannya dapat dioptimalkan. Akan tetapi, apabila besarnya jumlah penduduk tidak dapat diimbangi dengan luasnya lapangan kerja, maka dapat menyebabkan masalah pengangguran dan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi (Atiyatna dkk., 2016).

Pembangunan ekonomi merupakan hubungan antara berbagai faktor produksi seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan teknologi. Peran manusia tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan ekonomi, karena manusia merupakan produsen bahkan konsumen dalam proses pembangunan itu sendiri (Muslihatinningsih dkk., 2020). Pembangunan ekonomi negara berkembang diarahkan agar terwujudnya pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terciptanya pendapatan yang merata, mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja. Salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara yaitu dengan melihat seberapa banyak kesempatan kerja yang dapat diciptakan dari pembangunan ekonomi tersebut (Basuki & Awanis, 2015). Banyaknya kesempatan kerja yang tercipta dapat meningkatkan pendapatan dan

meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan sejahtera.

Ketenagakerjaan merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia karena didalamnya mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat jika dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, sehingga salah satu tujuan terpenting dalam pembangunan ekonomi yaitu berhasil menghadirkan lapangan pekerjaan yang cukup agar angkatan kerja yang tersedia dapat terserap (Tahir, 2018). Masalah terkait penyerapan tenaga kerja merupakan masalah yang penting karena manusia merupakan faktor utama dalam meningkatkan suatu pembangunan ekonomi. Allah SWT menciptakan manusia dengan segala bentuk kekurangan maupun kelebihan masing-masing dan diperintahkan untuk senantiasa mencari rezeki yang ada dimuka bumi.

Hal tersebut tercermin dalam QS. At-Taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Dan Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat di atas memerintahkan umat manusia agar senantiasa melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Umat manusia harus senantiasa ingat bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan

tidak dapat disembunyikan baik perbuatan terpuji maupun tercela. Segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dilihat oleh Allah SWT, Rasul, dan saksi-saksi dari umat muslim. Allah SWT akan memperlihatkan segala perbuatan manusia saat hari kiamat tiba dan manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila didunia senantiasa melakukan perbuatan baik maka akan mendapatkan pahala, jika sebaliknya maka akan mendapat siksa (Suma dalam Kurniawan, 2019).

Sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka berterbaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingat lah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila manusia telah menunaikan ibadah sholat, maka Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk mencari rezeki yang halal dimuka bumi dan senantiasa selalu ingat kepada Allah atas segala karunianya. Umat manusia diminta untuk senantiasa berdzikir ketika mencari rezeki agar tidak mudah putus asa dan memperoleh kemenangan atas apa yang diinginkan serta terhindar dari hal-hal yang buruk (Khairil dkk., 2020).

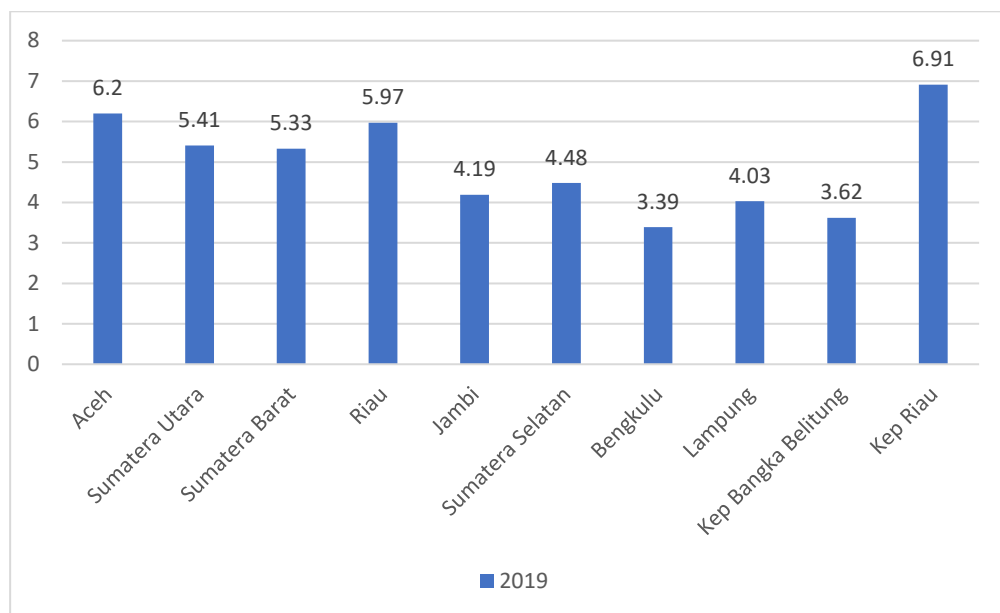
Masalah terkait ketenagakerjaan di Indonesia hingga saat ini masih cukup kompleks, seperti tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan oleh banyaknya angkatan kerja yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang

tersedia. Pengangguran yang terjadi dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat menjadi rendah, sehingga berdampak pada masalah kemiskinan bahkan dapat memicu terjadinya kriminalitas (Biamrillah & Nurhayati, 2018). Oleh sebab itu, setiap individu harus memiliki potensi yang unggul agar mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebesar 133,56 juta orang, meningkat sebesar 2,55 juta orang jika dibandingkan dengan tahun 2018. Angkatan kerja merupakan komponen yang terbentuk dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2019 tercatat sebesar 126,52 juta orang dan sebesar 7,05 juta orang menganggur. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah penduduk yang bekerja bertambah 2,50 juta orang dan jumlah penduduk yang menganggur bertambah 50 ribu orang (Statistik, 2019).

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi ketenagakerjaan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, walaupun dengan tingkat proporsi yang berbeda. Setiap daerah kerap kali dihadapkan dengan permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan seperti pengangguran. Pengangguran yang terjadi dipicu oleh banyaknya angkatan kerja yang tidak mampu terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Indikator yang digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yaitu dengan melihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah tersebut. Kepulauan

Riau merupakan provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi. Berikut ini data terkait jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 di setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

GAMBAR 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antar Provinsi
di Pulau Sumatera Tahun 2019

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2019 berbeda-beda. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berada pada Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 6,91 persen, kemudian disusul oleh Provinsi Aceh sebesar 6,2 persen, Provinsi Riau sebesar 5,97 persen, Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,41 persen, Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,33 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,48 persen, Provinsi Jambi 4,19 sebesar persen, Provinsi Lampung sebesar 4,03 persen, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,62 persen dan Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) terendah yaitu berada pada Provinsi Bengkulu dengan angka sebesar 3,39 persen.

Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh banyaknya penduduk yang melakukan migrasi masuk ke provinsi tersebut. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan persentase tertinggi penambahan penduduk akibat banyaknya migran risen dan migran seumur hidup yang masuk ke provinsi tersebut. Penduduk yang melakukan migran risen ke Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2019 sebesar 9,7 persen dan yang melakukan migran seumur hidup sebesar 46,4 persen. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau memiliki tempat kelahiran di luar provinsi tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang menjadi daya tarik ekonomi bagi para migran (Statistik, 2019).

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menghadirkan kualitas pekerjaan yang layak dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penduduk dapat berdampak pada meningkatnya jumlah angkatan kerja, sehingga harus diimbangi dengan luasnya lapangan pekerjaan agar tidak menyebabkan angka pengangguran yang melambung tinggi. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam perekonomian, sehingga dalam melakukan proses produksi, maka sangat dibutuhkan tenaga kerja yang tergolong dalam angkatan

kerja (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Berikut data ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2019:

TABEL 1.1
Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2019 (Orang)

Kegiatan	2016	2017	2018	2019
Penduduk Usia Kerja	1.412.772	1.454.769	1.499.059	1.552.213
Angkatan Kerja	931.435	966.091	970.132	1.005.161
Bekerja	859.813	896.931	901.019	935.682
Pengangguran	71.622	69.160	69.113	69.479
Bukan Angkatan Kerja	481.337	488.678	528.927	547.052
Sekolah	123.308	140.060	133.156	144.335
Mengurus Rumah Tangga	331.681	304.775	346.678	359.131
Lainnya	27.140	43.843	49.093	43.586

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kepulauan Riau

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas menggambarkan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Setiap tahunnya jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Riau selalu mengalami peningkatan. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 1,41 juta orang dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka sebesar 1,55 juta orang pada tahun 2019. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja disetiap tahunnya, maka akan berdampak pula pada meningkatnya jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 sebesar 931 ribu orang dan terus meningkat hingga mencapai 1,01 juta orang pada tahun 2019.

Angkatan kerja merupakan komponen yang terbentuk dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, maka jumlah penduduk yang bekerja juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 859 ribu orang dan terus mengalami peningkatan

hingga tahun 2019 menyentuh angka sebesar 935 ribu orang. Sementara itu jumlah pengangguran setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

Peningkatan jumlah angkatan kerja mengindikasikan bahwa adanya peningkatan penawaran tenaga kerja yang tersedia pada pasar kerja. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum tentu diimbangi dengan peningkatan permintaan tenaga kerja yang dapat menyerap angkatan kerja yang ada. Oleh sebab itu, tingginya angkatan kerja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar angkatan kerja dapat terserap. Kemampuan dan keterampilan seorang tenaga kerja juga harus ditingkatkan, agar produktivitas tenaga kerja meningkat dan perekonomian suatu daerah maupun suatu negara menjadi lebih baik lagi.

Angkatan kerja merupakan indikator yang penting dalam pembangunan ekonomi dan merupakan sumber daya manusia yang berpotensi aktif secara ekonomi. Oleh sebab itu, apabila angkatan kerja banyak terserap oleh pasar tenaga kerja, maka akan mendorong kemajuan ekonomi. Meningkatnya jumlah angkatan kerja akan sejalan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, karena dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dapat mendorong perluasan kesempatan kerja (Halim dkk., 2015).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi sedikit banyaknya penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah. Kebijakan upah minimum merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem upah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Kebijakan ini dilakukan agar upah

perkapita para pekerja meningkat dan berdampak pada meningkatnya upah rata-rata para tenaga kerja (Wasilaputri, 2016). Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, dampak dari penetapan upah minimum ini tidak hanya sekedar perihal upah saja, melainkan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja yang ada (Tahir, 2018). Berikut ini merupakan data upah minimum yang terdapat di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2019:

TABEL 1.2
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2019

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Karimun	2.418.254	2.617.760	2.845.766	3.074.281
Bintan	2.645.017	2.863.231	3.112.618	3.362.561
Natuna	2.252.300	2.438.115	2.650.475	2.863.308
Lingga	2.201.010	2.382.593	2.590.116	2.798.102
Kepulaua Anambas	2.425.110	2.697.935	2.932.925	3.168.439
Batam	2.994.111	3.241.125	3.523.427	3.806.358
Tanjung Pinang	2.179.825	2.359.661	2.565.187	2.771.172
Kepulauan Riau	2.178.710	2.358.454	2.563.875	2.769.754

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kepulauan Riau

Upah minimum Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2016 upah minimum Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka sebesar Rp. 2.178.710 dan pada tahun 2019 upah minimum menyentuh angka sebesar Rp. 2.769.754. Jumlah upah minimum setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap daerah yang berbeda. Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa upah minimum di setiap kabupaten/kota selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upah minimum tertinggi berada pada Kota Batam dengan jumlah upah minimum pada tahun

2019 sebesar Rp. 3.806.358, sedangkan upah minimum terendah berada pada Kota Tanjungpinang dengan jumlah upah minimum pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.771.172.

Upah merupakan uang yang diberikan oleh para pengusaha kepada para karyawannya sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ketika upah mengalami kenaikan maka biaya produksi juga akan ikut naik, sehingga para produsen akan meningkatkan harga jual barang per unitnya. Ketika harga jual barang mengalami peningkatan, maka para konsumen akan cepat tanggap dan berupaya untuk mengurangi jumlah konsumsinya atau bahkan tidak lagi mengkonsumsi barang tersebut. Menurunnya tingkat konsumsi ini akan berdampak pada menurunnya jumlah produksi dan para pengusaha akan mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja (Sumarsono, 2003).

Selain upah minimum, terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu investasi. Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membeli berbagai barang modal dan perlengkapan produksi agar barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat. Modal yang digunakan dapat berupa uang maupun barang seperti mesin dan teknologi lainnya. Meskipun suatu perusahaan menginvestasikan dalam bentuk barang, akan tetapi peran manusia tidak dapat diabaikan karena manusialah yang nantinya akan mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Investasi diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat,

dengan banyaknya angkatan kerja yang terserap oleh pasar tenaga kerja (Sukirno, 2019).

TABEL 1.3
Investasi dan Laju Pertumbuhan Investasi di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

Tahun	Investasi (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan Investasi (Persen)
2016	62.584.779,74	3,21
2017	63.509.216,36	1,48
2018	69.262.923,71	9,06
2019	73.447.469,32	6,04

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Investasi di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah investasi pada tahun 2016 sebesar 62.584.779,74 juta rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh angka sebesar 73.447.469,32 juta rupiah pada tahun 2019. Investasi secara langsung dapat membuat kapasitas produksi meningkat. Laju pertumbuhan investasi mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Laju pertumbuhan investasi terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 1,48 persen, sedangkan laju pertumbuhan investasi tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 9,06 persen.

Investasi merupakan kegiatan pembelanjaan modal agar kapasitas produksi yang dihasilkan semakin meningkat dimasa yang akan datang. Untuk meningkatkan kapasitas produksi tersebut membutuhkan modal manusia didalamnya. Artinya, apabila kapasitas produksi mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan permintaan faktor produksi juga turut meningkat, seperti tenaga kerja (Wasilaputri, 2016).

Selain investasi, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perekonomian suatu wilayah dapat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dengan membandingkan jumlah PDRB setiap tahunnya. Terpilihnya PDRB atas dasar harga konstan sebagai indikator untuk menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena, dapat menggambarkan kondisi pertumbuhan produksi riil dari tiap-tiap sektor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah menggambarkan terjadinya peningkatan pada produksi disetiap sektor ekonomi (Statistik, 2020). Peningkatan produksi tersebut diharapkan nantinya dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berikut ini merupakan data PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2019:

TABEL 1.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2016	162.853.038,99	4,98
2017	166.081.675,71	1,98
2018	173.684.300,00	4,58
2019	182.183.730,00	4,89

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa PDRB di Provinsi Kepulauan Riau selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 162.853.038,99 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 182.183.730,00 juta rupiah. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan suatu daerah dalam

mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan diberbagai sektor ekonomi (Kamar, 2017). Meningkatnya PDRB disuatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya jumlah output dan penjualan diberbagai sektor ekonomi. Ketika output meningkat, maka suatu perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk memenuhi peningkatan output dan penjualan di berbagai sektor ekonomi (Feriyanto, 2014).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau cenderung fluktuatif. Persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 4,98 persen dan persentase pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sekitar 1,98 persen. Rendahnya laju pertumbuhan di tahun 2017 disebabkan oleh terjadinya penurunan nilai tambah akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian dan pertambangan. Laju pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan angka negatif yaitu sekitar -1,21 persen dan laju pertumbuhan sektor pertambangan menunjukkan angka -4,59 persen. Hal ini lah yang mendorong laju pertumbuhan provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 bergerak lambat (Statistik, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati dan Boedirochminarni (2018) dengan judul “Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik”. Teknik analisis data menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah dan angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan dan bertanda positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel industri berpengaruh

signifikan dan bertanda negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel upah dan angkatan kerja. Perbedaan penelitian terletak pada peneliti yang menambahkan variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta melakukan penelitian di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian Rakhmawati dan Boedirochminarni menambahkan variabel jumlah industry dan melakukan penelitian di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meilasari (2020) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa tahun 2010-2016”. Teknik analisis data menggunakan Analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel PDRB dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel upah dan investasi serta menggunakan teknik analisis regresi data panel. Adapun perbedaan penelitian terletak pada peneliti yang menambahkan variabel angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta melakukan penelitian di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian yang dilakukan oleh Meilasari menambahkan variabel PDRB dan dilakukan di Pulau Jawa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusniati dkk., (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang”. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, variabel upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum. Perbedaan penelitian terletak pada peneliti yang menambahkan variabel angkatan kerja dan investasi di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rusniati, dkk dilakukan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2019”. Besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi variabel-variabel yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019.

2. Variabel independen yang digunakan adalah angkatan kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), investasi, dan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019.

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2019.

E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis.

Secara praktis memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar dapat memperhatikan masalah terkait ketenagakerjaan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dan jumlah penyerapan tenaga kerja semakin meningkat, serta kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

2. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis menjadi bahan referensi untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja di masa yang akan datang.